



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2025

Plt. KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KEPULAUAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



EKO KURNIAWAN, S.Sos., M.Si  
NIP. 19700926 199703 1 007

# Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Penguatan Kehidupan yang Berdemokrasi Berdasarkan Pancasila”

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya,  
Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kasus Pada Tahun } n}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100 \%$$

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 5 (lima) Program, yakni Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial., Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 100% capaiannya tetap pada tahun 2024 yaitu 100%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah”:

- Diukur dengan indikator sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah,

Formulasi Perhitungan :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah
------------------------------

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
2. Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Pemilih;
3. Meningkatkan Kualitas Lembaga Demokrasi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

KATA	
PENGANTAR.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF3	
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1.Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2.Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	11
1.3.Isu-isu Strategis.....	12
1.4.Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	12
1.5.Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2024.....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024.....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2024.....	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33

# Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024 .....	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis PD ...Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 .....	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 .....	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala PD ..... Tahun 2024.....	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1 .....	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja .....	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024 .....	27

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10
Gambar II.1. Website PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung....	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website PD ..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	10



# BAB I

## Pendahuluan

### **Bab I berisi :**

1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

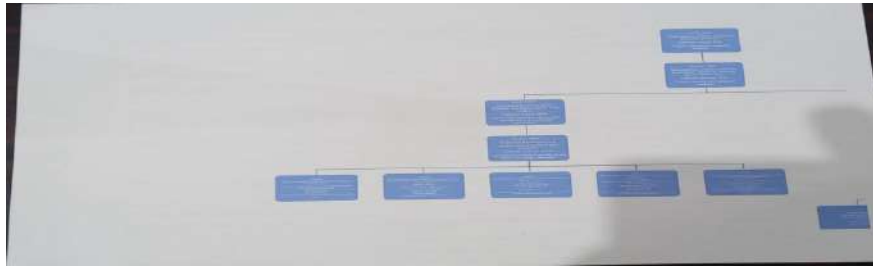
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat ataskinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **1.1 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**

Setiap Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi  
*Cascading*



Ket : cascading Lengkap dapat dilihat melalui link :  
<https://bit.ly/doklakipkesbangpol2024>



“PETA PROSES BISNIS”

Ket : Peta Proses Bisnis lengkap dapat dilihat melalui link :  
<https://bit.ly/doklakipkesbangpol2024>



Ket : Struktur Organisasi lengkap dapat dilihat melalui link :  
<https://bit.ly/doklakipkesbangpol2024>

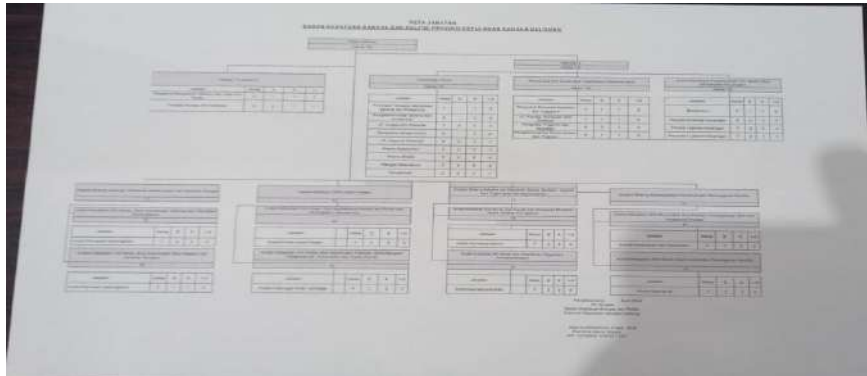
## 1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.  
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adapun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan Provinsi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Penyelenggaraan koordinasi teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan provinsi;
5. Penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Penyelenggaraan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
7. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas fungsinya



### 1.3 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh”, antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai Pancasila di masyarakat;
2. Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Belum optimalnya Peran dan Fungsi Lembaga Demokrasi.

### 1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA				JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKUTRAL</b>												
1	Kepala Badan	1		1		1	1				1		
2	Sekretaris	1		1		1	1					1	
3	Kepala Sub Bagian Umum	1		1		1		1				1	
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	1		1		1	1				1		
5	Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	1		1		0							
6	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	1		1		1		1				1	
7	Kepala Bidang Kewaspaaan Nasional	1		1		1	1					1	
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>												
1	Perencana Ahli Muda	1		1		1	1					1	
2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1		1		1	1				1		
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	8		8		7	3	4			6	1	
4	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	1		1		1		1			1		
5	Pranata Humas Ahli Madya	1		1		0							
6	Pranata Komputer Ahli Muda	1		1		1		1			1		
7	Arsiparis Terampil	1			1	0							

<b>C</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>												
1	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1		1			1		1			1	
2	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1				1	1				1		1
3	Pengadministrasi Umum	1				1	1				1		1
4	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7		1			1		1				1
5	Pengelola Program dan Kegiatan	1				1	1			1		1	
6	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1				1	1				1	1	
7	Bendahara	1		1			1		1				1
8	Penyusun Laporan Keuangan	1		1			0						
9	Penata Laporan Keuangan	1		1			0						
10	Pengadministrasi Keuangan	1				1	0						
11	Analisis Wawasan Kebangsaan	4		4			2		2				2
12	Analisis politik Dalam Negeri	2		2			0						
13	Analisis Hubungan Antar lembaga	2		2			0						
14	Analisis Masyarakat	4		4			4		4			2	2
15	Analisis Pertahanan dan Keamanan	3		3			1		1			1	
16	Analisis Keamanan	2		2			2		2			1	1
<b>D</b>	<b>PPPK/PHL</b>												
1	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama (PPPK)	2		2			2		2				2
2	Pramu Bakti	5				5	5					2	3
3	Tenaga Kebersihan	7				7	7					3	4
4	Tenaga Pengamanan	5				5	5					5	
5	Supir	1				1	1					1	

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (62,86%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 9 orang (25,7%), D3 sebanyak 1 orang (2,86%), SLTA sebanyak 3 orang (8,57%), SLTP sebanyak 0 orang (0%), dan SD sebanyak 0 orang (0%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>1</b>	<b>26.145.135</b>
	tanah	1	26.145.135
<b>2</b>	<b>Peralatan dan mesin</b>		<b>3.292.510.606</b>
	alat besar		14.000.000
	alat angkutan		934.502.000
	alat bengkel dan alat ukur		
	alat pertanian		
	alat kantor dan rumah tangga		1.350.228.516
	alat studio, komunikasi dan pemancar		84.194.000
	alat kedokteran dan kesehatan		
	alat laboratorium		
	alat persenjataan		
	komputer		909.586.090
	alat eksplorasi		
	alat pengeboran		
	alat produksi, pengolahan dan pemurnian		
	alat bantu eksplorasi		
	alat keselamatan kerja		
	alat peraga		
	peralatan proses/produksi		
	rambu – rambu		
	peralatan olah raga		
<b>3</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>	<b>1</b>	<b>2.002.685.320</b>
	bangunan gedung	1	2.002.685.320
	monumen		

	bangunan menara		
	tugu titik kontrol/pasti		
<b>4</b>	<b>Jalan, irigasi dan jaringan</b>		<b>47.600.000</b>
	jalan dan jembatan		
	bangunan air		
	instalasi		
	jaringan		47.600.000
<b>5</b>	<b>Aset tetap lainnya</b>	<b>28</b>	<b>68.950.625</b>
	bahan perpustakaan	28	Rp. 68.950.625
	barang bercorak kesenian/kebudayaan/olaha		
	hewan		
	biota perairan		
	tanaman		
	barang koleksi non budaya		
	aset tetap dalam renovasi		
<b>6</b>	<b>Konstruksi dalam pengerjaan</b>		<b>89.859.000</b>
	konstruksi dalam pengerjaan		89.859.000
<b>7</b>	<b>dll.</b>		
	<b>Total</b>		<b>5.528.176.637</b>

Kendaraan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 2 unit kendaraan operasional, 2 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadamkebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 90% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak/mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2023	53.761.911.185	936.285.900	-	-	54.698.277.285
2024	70.072.481.387	637.646.400	-	-	70.710.127.787

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2024 dibanding tahun 2023 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 16.011.850.502 Tetapi anggaran yang tersedia diperuntukkan Hibah KPU dan Bawaslu sebesar 60% dari Total Hibah pelaksanaan Pilpres dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

# BAB 2

## Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Bab 2 Berisi :*

1. *Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
2. *Strategi dan Arah Kebijakan*
3. *Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024*
4. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*
5. *Perjanjian Kinerja Tahun 2024*
6. *Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi (Sasaran RPD yang diampu PD) Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh
2. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah

Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	Persen	0	75%	50%	25%	25%	100%	
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	0	66	68	70	72	72	

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Memperkuat Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kebhinekatunggalikaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat	Peningkatan Pembinaan Pemahaman Masyarakat Terhadap Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
		Memperkuat Pemahaman dan Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Berdemokrasi
		Meningkatkan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan Pembinaan Ormas Dalam rangka Sinergitas Dengan Pemerintah
		Optimalisasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

		Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah

### 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
1. Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis berdasarkan Pancasila	<b>1.1.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>3.000.645.640</b>	<b>2.903.638.640</b>	<b>(97.007.000)</b>
	1.1.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.000.645.640	2.903.638.640	(97.007.000)
	<b>1.2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>57.753.789.860</b>	<b>57.868.809.860</b>	<b>115.020.000</b>
	1.2.1 Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan	57.753.789.860	57.868.809.860	115.020.000

	Pemerintahan ,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
	<b>1.3. Program PEMBERDAYAAN dan PENGAWASAN Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>175.400.000</b>	<b>169.753.400</b>	<b>(5.646.600)</b>
	1.3.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	175.400.000	169.753.400	(5.646.600)
	<b>1.4. Program PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>773.882.400</b>	<b>583.578.000</b>	<b>(190.304.400)</b>
	1.4.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	773.882.400	583.578.000	(190.304.400)
	<b>1.5. Program PENINGKATAN Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>1.311.193.500</b>	<b>616.286.800</b>	<b>(694.906.700)</b>
	1.5.1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.311.193.500	616.286.800	(694.906.700)
	<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>	<b>63.014.911.400</b>	<b>62.142.066.700</b>	<b>(872.844.700)</b>

## 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/07/KESBANGPOL-I/2024 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

## **2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikatorkinerjanya.

### **2.5.1 Perjanjian Kinerja 2024 (Induk)**

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 yang

merepresentasikan kinerja instansi dengan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4  
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	%	100%	Triwulan I	25%
					Triwulan II	25%
					Triwulan III	25%
					Triwulan IV	25%
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	Triwulan I	20
					Triwulan II	20
					Triwulan III	20
					Triwulan IV	20

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 3.000.645.640	APBD
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 57.753.789.860	APBD
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp. 175.400.000	APBD
		Pembinaan dan	Rp. 773.882.400	APBD

		Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Rp. 1.311.193.500	APBD
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Pemerintahan Provinsi	Urusan daerah	Rp. 9.050.352.364	APBD

### 2.5.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024

Pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reuiu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : BA/789.3/BAKESBANGPOL/2024 Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
1.	Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	%	100 %	Triwulan I	25%

					Triwulan II	25%
					Triwulan III	25%
					Triwulan IV	25%
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	Triwulan I	20
					Triwulan II	20
					Triwulan III	20
					Triwulan IV	20

Tabel II.9 Komponen Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.903.638.640	APBD
		Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 57.868.809.860	APBD
		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 169.753.400	APBD
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 583.578.000	APBD
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 616.286.800	APBD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.568.061.087	APBD

--	--	--	--	--

Keterangan Tambahan:

1. Tetapi anggaran berkurang 0,98 % sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
4. Tidak mengelola anggaran Dekonsentrasi.

## 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <http://kesbangpol.babelprov.go.id> Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Gambar II.2. Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi :**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2024*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2024				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Indikator: <u>Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya</u>  Formula Perhitungan: Jumlah Kasus Pada Tahun N dibagi Jumlah Kasus dikali 100%	%		100	100	100	Sangat Baik		100
2.	Meningkatkan Tata kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		68,65	80				82

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

### 3.1.1. Sasaran :

#### Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila

Kinerja sasaran Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila diukur dengan indikator Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	$\frac{\text{Jumlah Kasus pada tahun n}}{\text{Jumlah Kasus}} \times 100\%$
2.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Kinerja sasaran “Penguatan Kehidupan Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan “Jumlah Kasus pada tahun n dibagi jumlah kasus dikali 100%”. Tahun 2024 capaian kinerja

sasaran ini adalah 100% atau sebesar 100% dari target 100%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian sd 2024 terhadap target 2026 %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	100	100	100	100	100	100	100	100

Analisis Ketercapaian Sasaran Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 100 %, sesuai target.
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 100% indikator sasaran Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila sama dengan tahun ini.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

- 1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Persentase

Daerah Terlibat Konflik Sosial” formula perhitungan indikator ini adalah  $(\text{Jumlah Daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun Berjalan} / \text{Jumlah Daerah Terlibat Konflik Sosial Tahun } n) \times 100\%$ . Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 50% dari target 50% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja Persentase Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi” formula perhitungan indikator ini adalah  $\text{Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi Tahun } n / \text{Jumlah Konflik yang Berlatarbelakang Ideologi Tahun } n-1 \times 100\%$ . Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 50% dari target 50% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% .

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Kegiatan Perumusan Kebijakan

Teknis dan Pemanntapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Persentase Pembinaan Politik di Daerah” formula perhitungan indikator ini adalah  $\frac{\text{Jumlah Pembinaan Politik di Daerah Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Pembinaan Politik di Daerah Tahun } n-1} \times 100\%$ . Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 30 dari target 30 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

**4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

dengan sasaran kinerja program “Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Indeks Kinerja Ormas” formula perhitungan indikator ini adalah  $\frac{\text{Indeks Kinerja Ormas}}{\text{Indeks Kinerja Ormas}} \times 100\%$  Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 55 dari target nilai 55 atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

**5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** dengan sasaran kinerja program Penguatan Kehidupan yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila” mempunyai Indikator kinerja “Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah” formula perhitungan indikator ini adalah “Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun Berjalan dibagi Jumlah yang akan Dibina dikali 100%” Capaian kinerja untuk indikator ini  $(3/3) \times 100\% = 100\%$  dari target 30% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Telah Dilaksanakannya Koordinasi dan Sinkronisasi yang Baik dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Badan/Dinas/Instansi Pusat Terkait kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila (Jumlah Kasus Pada Tahun n dibagi Jumlah Kasus dikali 100%)	*	100	*	100	*	100

Indikator dan target sasaran ini tidak bisa di bandingkan dengan indikator dan target nasional karena cakupan indikator nasional lebih luas daripada indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.1.1.1 Data Dukung Capaian Penguatan Kehidupan Yang Berd3.1.1.1  
Data Dukung Capaian Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis  
Berdasarkan Pancasila

a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas  
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas  
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial melekat pada Bidang  
Kewaspadaan Nasional dan Pengawasan Konflik kegiatan sebagai berikut,  
yaitu :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan  
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran  
sebesar Rp 616.286.800.-

Gambar III.1

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas  
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial  
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan  
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.	 <small>08/04/2023 08:51:18 (1) 10100000</small> <small>08-37001</small>	1. Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

2.		2. Rapat TIM Kewaspadaan Dini Provinsi
----	---	--

3.		3. Monitoring dan Evaluasi
4.		4. Pemantauan Aksi Demo
5.		5. Pemantauan Aksi Demo

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melekat pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagai berikut, yaitu :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp 2.903.638.640-

Gambar III.2  
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan  
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

NO.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		1. Rapat Tim Seleksi Paskibraka
2.		2. Pembukaan Pemusatan Pelatihan Paskibraka
3.		3. Pengukuhan Paskibraka

4.



4. Rapat Panitia HUT RI

5.



5. Upacara Peringatan HUT RI

6



6. Pawai Peringatan HUT RI



7.



7. Rapat Forum Pembauran  
Kebangsaan

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik melekat pada Bidang Politik Dalam Negeri sebagai berikut, yaitu :

Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp 57.868.809.860.-

**Gambar III.3**  
**Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta Pemantauan Situasi Politik**

NO.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		1. Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pelajar

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melekat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagai berikut, yaitu :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp 169.753.400.-

Gambar III.4

Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NO.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
-----	----------------------------------	------------

1.		1. Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Teraftar di seluruh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.		2. Sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas
3.		3. Koordinasi Keormasan di Ditjen Kemendagri RI
4.		4. Rapat TIMDU Pengawasan Ormas

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Keahanan Ekonomi, Sosial Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Keahanan Ekonomi, Sosial Budaya melekat pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagai berikut, yaitu :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan anggaran sebesar Rp 583.578.000.-

Gambar III.5

Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,  
 Sosial dan Budaya

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang  
 Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

NO.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		1. Workshop Kegiatan P4GN di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
2.		2. Rapat TIM Audensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
3.		3. Sosialisasi P4GN dan PIC di Lingkungan PD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.		4. Pembagian Spanduk P4GN ke Kecamatan/ Kota/ Desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5.		5. P4GN Award Tahun 2024 di Gedung Mahligai Rumdin Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
6.		6. Rapat Internal Bidang Ekososbud Agama dan Ormas terkait Evaluasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran 2 :

### 3.1.1. Sasaran 2: Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP . Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Kinerja sasaran “Meningkatkan tata Kelola Internal Perangkat Daerah” diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”. Tahun 2024 capaian kinerja sasaran ini adalah 100% atau sebesar 100% dari target 100%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

### 3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	100%	100%	100%	62.142.066.700	61.546.697.350	99,04%	595.369.350
2	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	100%	8.568.061.087	7.791.201.353	90,93%	776.859.734
<b>Total Belanja</b>						<b>70.710.127.787</b>	<b>69.337.898.703</b>	<b>98,06%</b>	<b>1.372.229.084</b>

Sumber: *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2024, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024*

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sama dengan target kinerja tahun 2024 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 70.710.127.787 terealisasi Rp 69.337.898.703 atau 98,06% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 1.372.229.084 yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Modal
- Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas
- Efisiensi Belanja ATK
- Efisiensi Belanja Paket Meeting
- Efisiensi Sewa Ruang Meeting

### 3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel 1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung            Nomor : 700/119/LHE/ITDA/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Kinerja yang dikumpulkan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;</li> <li>2. Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara langsung;</li> <li>3. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural amupun fungsional;</li> </ol>	<p>PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2024 dengan langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan Pengumpulan Data Kinerja yang relevan dan mendukung untuk mencapai kinerja yang diharapkan</li> <li>2. Melakukan pemantauan dan pengukuran capaian kinerja unit dibawah secara berjenjang</li> <li>3. Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun</li> </ol>

<p>4. Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;</p> <p>5. Laporan kinerja agar sepenuhnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan analisis dan evaluasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional, dan</li> <li>Menjadi kepedulian seluruh pegawai</li> </ol> <p>6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan;</li> <li>Dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;</li> <li>Menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi); dan</li> <li>Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja implementasi SAKIP.</li> </ol>	<p>fungsional</p> <p>4. Memamfaatkan Hasil Pengukuran Kinerja apakah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atau penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja</p> <p>5. A. Dalam Laporan Kinerja akan menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional B. Laporan Kinerja akan diinformasikan kepada seluruh pegawai untuk menjadi kepedulian</p> <p>6. A. Membuat SK Kepala Badan tentang Evaluasi akuntabilitas Internal Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung B.membuat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kesbangpol secara mendalam C. Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja D. Memanfaatkan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan implementasi SAKIP.</p>
---	--

Bukti dukung tindak lanjut atas rekomendasi diatas adalah sebagai berikut :

<http://bit.ly/doklakipkesbangpol2024>

### **3.4 Inovasi**

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi AWAS BABEL, untuk laporan terkait situasi kamtibmas dalam bentuk laporan situasi harian daerah.

### **3.5 Penghargaan**

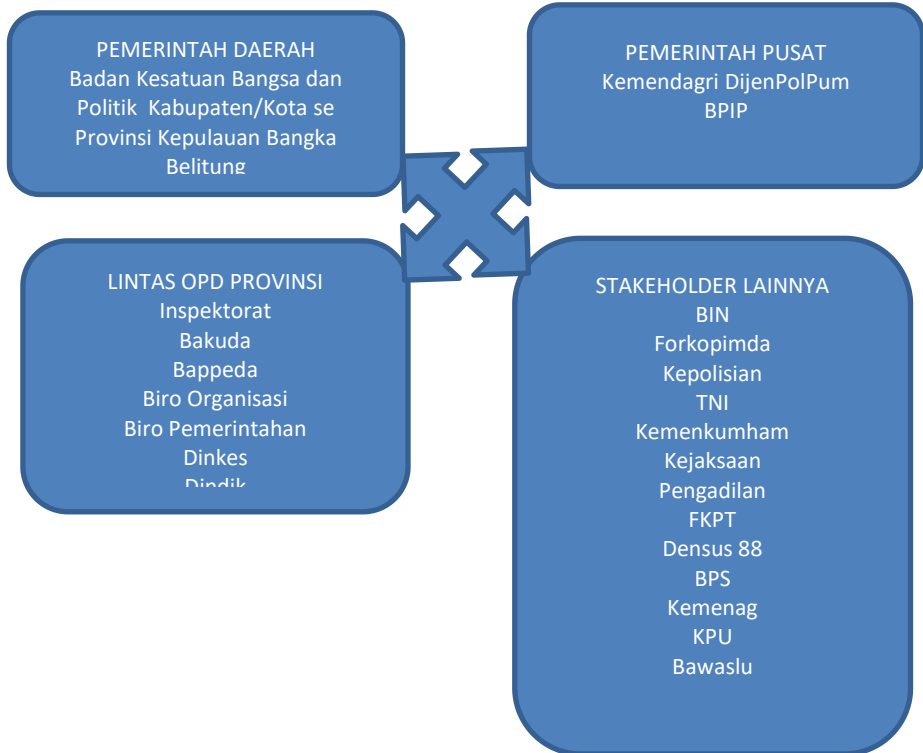
Sepanjang Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam rangka Mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba DiBidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### **3.6 Crosscutting**

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya

## CROSS CUTTING



# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi :**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

### **4.1 Kesimpulan**

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, indikator kinerja Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya tercapai dengan presentase 100%, dan untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai dengan presentase 100%.
2. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data perencanaan dan kegiatan untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya sistem terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kabupaten/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari berbagai stakeholder terkait untuk mendukung program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam upaya Mencapai Target Kinerja mewujudkan Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila dan menurunkan Persentase Peristiwa Konflik Sosial.

## **4.2 Rekomendasi**


Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi dengan berbagai pihak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah Terorisme dan Radikalisme.
2. Memaksimalkan peran Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan Peran dan Fungsi Badan Kesbangpol melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan. Disamping itu juga harus selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait,
3. Pemerintah, LSM, swasta dan stakeholders harus lebih meningkatkan kerja sama dalam penyadaran hak-hak difabel melalui banyak media seperti, diskusi, workshop, media massa ataupun fasilitas web. Penyedia layanan transportasi.
4. publik juga perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi yang aksesibel dan ramah difabel.
5. Memberikan penanaman nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan terutama bagi pelajar.
6. Memaksimalkan potensi sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## **4.3 Rencana Aksi**

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi



secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.

3. Koordinasi dan komunikasi dengan antar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih intensif.
4. Koordinasi dan komunikasi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih intensif.



# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh	Penguatan Kehidupan Yang Berdemokratis Berdasarkan Pancasila	Persentase Peristiwa Konflik Sosial Menurun Setiap Tahunnya	75%	50%	25%	25%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah	66	68	70	72



### Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 disertai dengan Berita Acara

**KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO. BUKU: 001  
TANGGAL: 15/01/2024

DIKEMUKAKAN OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

DITANDAI OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Penyusunan Dokumen Perubahan	100%	100%	15/01/2024 - 31/01/2024	[Nama]
2.	Penyusunan Laporan Perubahan	100%	100%	15/01/2024 - 31/01/2024	[Nama]

**PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO. BUKU: 002  
TANGGAL: 15/01/2024

DIKEMUKAKAN OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

DITANDAI OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

**PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO. BUKU: 003  
TANGGAL: 15/01/2024

DIKEMUKAKAN OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

DITANDAI OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

### Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 Tahun 2024

**RENCANA AKSI**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1.	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi	100%	100%	15/01/2024 - 31/01/2024	[Nama]
2.	Penyusunan Laporan Rencana Aksi	100%	100%	15/01/2024 - 31/01/2024	[Nama]

**BERITA ACARA**

NO. BUKU: 004  
TANGGAL: 15/01/2024

DIKEMUKAKAN OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

DITANDAI OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

**PERUBAHAN TAHUN 2024**

NO. BUKU: 005  
TANGGAL: 15/01/2024

DIKEMUKAKAN OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

DITANDAI OLEH:  
KELOMPOK KERJA PELAKSANA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner





Lampiran 6. Tindakan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2024

No	REVISI/REVISI	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	INDIKATOR	TINDAK LANJUT				LAKU	TAMBAT
						INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR		
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

No	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024





